



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. SOEKANDAR
Jalan Hayam Wuruk 25 Mojokerto Jawa Timur
website:rsudsoekandar.mojokertokab.go.id

RENCANA KERJA TAHUN 2025



RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	6
Landasan Hukum Penyusunan	7
Maksud dan Tujuan Penyusunan	12
Sistematika Penulisan	12
BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	19
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	19
Analisis Kinerja Pelayanan OPD	25
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD	30
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	31
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN	36
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	36
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	36
Program dan Kegiatan	37
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	40
BAB 5 PENUTUP	46

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto dapat menyelesaikan penyusunan Rankir rencana kerja tahun 2024. Diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto sesuai dengan visi dan misi.

Hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto mempunyai peluang yang cukup baik, namun juga memiliki beberapa ancaman yang harus dihadapi terutama dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekarang ini. Agar dapat mengantisipasi berbagai ancaman, maka rumah sakit harus mengoptimalkan kekuatan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan/ penerima pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, rumah sakit melakukan penyusunan Rankir rencana kerja tahun 2025 guna menghadapi dan memenangkan persaingan yang semakin ketat.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rankir rencana kerja tahun 2025.

Mojokerto, Juni 2024

**Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto**



Dr. Djalu Naskutub, M.M.R

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 200112 1 001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Apabila dihubungkan dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional, diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek demografi atau kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan Akhir proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang akan dicapai pada tahun rencana. Ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun, (2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (4) Rencana strategis (renstra) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun,

(5) Rencana kerja (renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus padapencapaian target pembangunan pada tahun rencana.

RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto merupakan organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan program pembangunan kesehatan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mojokerto (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Mojokerto yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Rankir renja RSUD Prof.dr. Soekandar tahun 2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*, berdasarkan masukan dari setiap unit kerja atau instalasi dan bidang bagian di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas

pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Rankir Rencana kerja organisasi perangkat daerah adalah dokumen rancangan Akhir perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada rencana strategis.

Pelaksanaan rencana kerja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh RSUD Prof. dr. Soekandar serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut laporan kinerja. Penyusunan Rankir rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diAkhir dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan sub kegiatan, analisa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.

Dengan adanya hal diatas, RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang memiliki mutu, kualitas, dan bersifat efektif serta efisien sehingga memberikan kepuasan pada kebutuhan dan keinginan lebih dari yang diharapkan pasien. Pelayanan prima, sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pasien, maka diperlukan persyaratan agar dapat dirasakan oleh setiap pemberi layanan untuk memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap pelayanan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 ttg Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
33. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15 – 1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi , validasi dan inventarisasi pemutakhiran Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi Standar Rumah Sakit Pendidikan
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
46. Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tarif RS
47. Peraturan Bupati Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2021 tentang SOTK RSUD

48. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
49. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/46/HK/416012/2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai BLUD Status Penuh
50. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/130/HK/416012/2000 Tentang Pendirian RSUD Kabupaten Mojokerto
51. Keputusan Direktur RSUD. Prof. dr. Soekandar Nomor 21 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra dan Renja tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Maksud dari penyusunan Rankir renja RSUD Prof. dr. Soekandar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan operasional tahunan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah, perencanaan dan arah kebijaksanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto bagi seluruh unit pelaksana di rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan.
3. Menjabarkan rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025 dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pada tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan Penyusunan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rankir renja Rsud Prof.dr. Soekandar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana kegiatan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
2. Mengevaluasi kinerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto tahun 2023 serta menganalisis prospek rencana kerja tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah;
3. Mengarahkan pencapaian visi dan misi RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025;
4. Menyusun kebijakan pembangunan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, program dan kegiatan tahun 2025;
5. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dayapembangunan;
6. Menyusun kaidah-kaidah pelaksanaan aspek-aspek pembangunan dan penganggaran;
7. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di RSUD Prof. dr. Soekandar dalam penyusunan rencana kerja 2025 dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan;

8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan;
9. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
10. Merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rankir renja RSUD Prof. dr. Soekandar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten /Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, dan langsung ditujukan kepada OPD, berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan/pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan).

BAB 3 Tujuan dan Sasaran OPD

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD berikut RKPD sesuai prioritas Daerah.

BAB 4 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan;

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan total;
3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
4. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rankir RKPD;
5. Dituangkan dalam Tabel "Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto."

BAB 4 PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama dan tandatangan kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD Prof. dr. SOEKANDAR

TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraOPD

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja, namun juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada beberapa tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta obyek pelayanan di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam rencana strategis dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian selengkapnya dapat diurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran RSUD Prof dr Soekandar Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah: Rsud Prof dr Soekandar Kab Mojokerto

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (%)	Anggaran	Realisasi	Sisa	PRESENTASE (%)
1	2	3		3	7	8	
	1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95%	231.240.756.000,00	222.748.903.717,00	8.491.852.283,00	96,33%
	1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN					
I	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	12.750.000,00	11.599.290,00	1.150.710,00	90,1 %
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	90%	6.375.000,00	5.725.513,00	649.487,00	89,81%
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	6.375.000,00	5.873.777,00	501.223,00	92,14%
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%				
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95%	14.810.274.000,00	14.202.559.404,00	607.714.596,00	95,90%
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95%				
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95%	188.000.000.000,00	180.319.006.085,00	7.680.993.915,00	95,91%
II	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	95%	20.000.000.000,00	19.953.200.000,00	46.800.000,00	99,77%
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Pelyanan Kesehatan	95%	8.417.732.000,00	8.262.538.938,00	155.193.062,00	98,16%
		JUMLAH		231.240.756.000,00	222.748.903.717,00	8.491.852.283,00	96,33%

Rincian hasil pelaksanaan program/ kegiatan tahun adalah sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
 - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 6.375.000,00, realisasi di tahun 2023 sejumlah Rp. 5.725.513,00 dengan presentase sebesar 89,81%.
 - Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp. 6.375.000,00, realisasi di tahun 2023 sejumlah Rp. 5.873.777,00 dengan presentase sebesar 92,14%.
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat dengan anggaran sejumlah Rp.14.810.274.000,00, realisasi di tahun 2023 sebesar Rp.14.202.559.404,00, dengan presentase sebesar 95,90%.
 - Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dengan anggaran sejumlah Rp. 188.000.000.000,00, realisasi di tahun 2023 sebesar Rp. 180.319.000.085,00 dengan presentase sebesar 95,91%
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu
 - a. Pengembangan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00, realisasi di tahun 2023 sebesar Rp. 19.953.200.000,00 dengan presentase sebesar 99,77%.
 - b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang medik fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.417.732.000,00, realisasi di tahun 2023 sebesar Rp. 8.262.538.938,00 dengan presentase sebesar 98,16%.

Dari hasil analisis diatas, pemanfaatan anggaran secara efisien sehingga ada sisa anggaran dapat digunakan di tahun berikutnya.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Dearah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : RSUD Prof dr Soekandar Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
				(n-3)	Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85,6 (A)	84,05 (A)	85,35 (A)	85,35	100,00%	84,50 (A)		
		INOVASI	4	1	2	2	100%	3		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90%	(-)	90%	90,98%	100%	90%		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen		
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	93,73%	95%	96,33%	101%	95%		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235 Orang/Bln	216 Orang/bln	230 Orang/bln	211 Orang/bln	92%	230)rang/bln		

1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran BLUD	95%	93,80%	95%	95,91%	101%	95%		
		IP ASN	87	71,61	81,5	89,8	110%	82		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran BLUD	95%	93,80%	95%	95,91%	101%	95%		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23 Unit	41 Unit	42 Unit	42 Unit	100%	41 Unit		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit /Gedung	(-)	2 Unit / Gedung	2 Unit/Gedung	100,00%	1 Unit		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Pelyanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	22 Unit	41 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di rumah sakit adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran RSUD Prof dr. Soekandar adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Tata Kelola Rumah Sakit	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
		Bed Occupancy Rate (BOR)
		Bed Occupancy Rate (BOR)
		Average Length Of Stay (ALOS)
		Turn Over Internal (TOI)
		Bed Turn Over (BTO)
		Net Death Rate (NDR)
		Gross Death Rate (GDR)
		CRR (Cost Recovery Rate)
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi RSUD yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah
		Indeks profesionalitas ASN
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR	IKK	TARGET RENSTRA PD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATANANALISA
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	-		82,5%	-	-	95,07	-	-	-	-	-	Penilaian terhadap RS bahwa RS telah memenuhi standar pelayanan
2	BOR	60-85%		65 %	65 %	65 %	76,65	-	-	-	-	-	Indeks pemanfaatan/ pemakaian tempat tidur
3	ALOS	6-9 hari		5 hari	5 hari	5 hari	4,53	-	-	-	-	-	Indeks rata-rata hari rawatan pasien
4	BTO	40-50 kali		50 kali	50 kali	50 kali	62,87	-	-	-	-	-	Indeks frekuensi pemakaian tempat tidur
5	TOI	1-3 Hari		2 hari	2 hari	2 hari	1,35	-	-	-	-	-	Indeks rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
6	NDR	≤ 25 ‰		≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	≤ 25 ‰	31,32	-	-	-	-	-	Indeks angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
7	GDR	≤ 45 ‰		≤ 45 ‰	≤ 45 ‰	≤ 45 ‰	53,47	-	-	-	-	-	Indeks angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
8	CRR	100%		100%	100 %	100 %	135,60	-	-	-	-	-	Indeks kemampuan rs dalam memenuhi kebutuhan operasional rs
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85,35	85,57	85,97	85,35	-	-	-	-	-	
10	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			95%	95%	95%	96,33	-	-	-	-	-	
11	Indeks Profesionalitas ASN			81,5	82	82,5	89,8	-	-	-	-	-	
12	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			2	3	4	2	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil evaluasi kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Prof dr. Soekandar, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang telah direncanakan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan pelayanan dan kegiatan pembangunan. Ketersediaan SDM baik secara kuantitatif dan kualitatif di RSUD Prof dr. Soekandar masih sangat kurang meliputi tenaga medis, paramedik dan non paramedik. Komposisi tenaga honorer cukup tinggi yang menjadi biaya operasional rumah sakit, sehingga membebani anggaran BLUD untuk memenuhi standart operasional di masing-masing kegiatan.

2. Sarana Prasarana

Kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana masing-masing di Instalasi. Ketersediaan bangunan/ gedung/ ruangan sudah memenuhi standart pelayanan kesehatan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Namun untuk mengoperasionalkan pelayanan diperlukan kebutuhan peralatan kantor seperti meubelair, perangkat komputer maupun peralatan sarana penunjang lainnya yang sampai saat ini belum tercukupi.

3. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Ditetapkannya Undang-undang SJSN, sangat mempengaruhi dinamika pelayanan kesehatan di Rumah sakit baik dari sisi pelayanan maupun sisi administratif yang semakin mengikat dan rumitnya birokrasi klaim yang ditetapkan oleh BPJS. Hal ini sangat mempengaruhi stabilitas keuangan untuk pembiayaan operasional kegiatan rumah sakit.

4. Pendanaan

Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit mewajibkan seluruh Rumah Sakit untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Maka pada Tahun 2014 RSUD Prof dr. Soekandar mulai menerapkan PPK-BLUD status penuh, namun dengan status Type B, RSUD Prof dr. Soekandar masih sangat perlu dukungan Dana APBD untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pengadaan peralatan kesehatan dan non

kesehatan karena pendapatan RSUD Prof dr. Soekandar masih kurang untuk mendanai kegiatan pelayanan operasional rumah sakit.

Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk peningkatan sarana, prasarana, gedung/bangunan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Prof dr. Soekandar yang memang statusnya milik Pemerintah Daerah.

Adanya kegiatan yang setiap tahunnya tidak tercukupi danannya dan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan farmasi rumah sakit yang merupakan kegiatan yang bersumber dana dari BLUD setiap tahunnya dana tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Gambaran review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.12 di bawah ini :

Tabel 2.12 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Akhir 2025 RKPD Kabupaten Mojokerto

Nama OPD : RSUD Prof. dr.Soekandar

N O	ANALISA					Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	RSUD Prof. dr. Soekandar			246.497.268.000					246.497.268.000	
1 . 02 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD Prof. dr. Soekandar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90%	152.015.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD Prof. dr. Soekandar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90%	152.015.000.000	
			Jumlah Inovasi yang terinterialisai dan tersosialisasi					Jumlah Inovasi yang terinterialisai dan tersosialisasi			
1 . 02 . 01. 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		15.000.000,00	PERENCANAAN, PENGANGGARA N, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		15.000.000,00	
1 . 02 . 01. 2.01. 01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000,00	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000,00	
1 . 02 . 01. 2.01. 07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000,00	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000,00	

1 . 02 . 01 . 2 .02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi penyediaan gaji, tunjangan ASN serta	95%	17.000.000.000	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase realisasi penyediaan gaji, tunjangan ASN serta	95%	17.000.000.000	
1 . 02 . 01 . 2.02. 01	Penyediaan Gajidan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235 orang/ bulan	17.000.000.000	Penyediaan Gaji danTunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235 orang/ bulan	17.000.000.000	
1 . 02 . 01 .2.10	PENINGKATAN PELAYANANBLUD		Persentase realisasi anggaran (BLUD); Indeks Profesionalitas ASN	95 % ; 87	135.000.000.000	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		Persentase realisasi anggaran (BLUD); Indeks Profesionalitas ASN	95 % ; 87	135.000.000.000	
1 . 02 . 01 . 2.10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	135.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	135.000.000.000	
1 . 02 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi;	Paripurna ;	94.482.268.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T		Capaian Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi;	Paripurna ;	94.482.268.000	
			Presentase Indikator SPM yang mencapai target	95 %				Presentase Indikator SPM yang mencapai target	95 %		
1 . 02 . 02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah Gedung/ Bangunan yang Dikembangkan ; Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;	1 Gedung Parkir 22 Unit/Set Alkes	94.482.268.000	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Jumlah Gedung/ Bangunan yang Dikembangkan ; Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;	1 Gedung Parkir 22 Unit/Set Alkes	94.482.268.000	
1 . 02 . 02 . 2 . 01. 05	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan, sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan	1 Gedung Parkir	70.000.000.000	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan, sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan	1 Gedung Parkir	70.000.000.000	

			Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk minimal 1 : 1000					Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk minimal 1 : 1000			
1 . 02 . 02 . 2. 01. 05 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	22 Unit/Set	24.482.268.000	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	22 Unit/Set	24.482.268.000	
					246.497.268.000					246.497.268.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Aspirasi usulan masyarakat ditampung oleh dewan kemudian diusulkan dalam bentuk program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang mendapatkan usulan tersebut. Pada tahun 2025, seluruh program/ kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, RSUD Prof. dr. Soekandar telah mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Tabel 2.13 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama PD : RSUD Prof. dr. Soekandar

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN RSUD Prof. dr. Soekandar

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arahan kebijakan RSUD Prof dr Soekandar dengan tujuan Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan penyakit menular seperti Covid 19 dengan indikator tujuan AHH.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Prof. dr. Soekandar

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021–2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun tujuan RSUD Prof dr Soekandar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026.

Sasaran RSUD Prof dr Soekandar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Tata Kelola Rumah Sakit.
2. Terwujudnya tata kelola birokrasi RSUD yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Capaian	
			Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,03	73,12
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,97 (A)	86,37 (A)

CASCADING TAHUN 2024 RSUD Prof.dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO														
VISI KABUPATEN MOJOKERTO														
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia														
MISI 1														
Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan														
TUJUAN OPD														
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN														
INDIKATOR TUJUAN OPD														
IKM														
TARGET INDIKATOR TUJUAN OPD														
86%														
SASARAN OPD														
Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit														
INDIKATOR SASARAN OPD														
Capaian Akreditasi														
TARGET SASARAN OPD														
PARIPURNA														
PROGRAM														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
SASARAN PROGRAM														
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM	Tercapainya Indikator Kinerja dan Pelayanan Sesuai Standar								Meningkatkan Kualitas Prosedur Layanan	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana, Fasilitas dan penunjang Layanan Kesehatan				
INDIKATOR PROGRAM														
IP ASN	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR	CRR	NILAI SAKIP	JUMLAH INOVASI YANG TERINTERNALISASI DAN TERSOSIALISASI SERTA BERKELANJUTAN	NILAI SPM RS	NILAI ASPAK	PERSENTASE GEDUNG SESUAI MASTERPLAN	PERSENTASE PEMENUHAN OBAT DAN BMHP	
TARGET KINERJA PROGRAM														
82%	60-85%	6-9 hari	1-3 hari	40-50 kali	25%o	45%o	90%	87,75	1	95%	80	100%	100%	
KEGIATAN														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Peningkatan Pelayanan BLUD					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			
SASARAN KEGIATAN														
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM								Meningkatkan Kualitas Prosedur Layanan	Tercapainya Indikator Kinerja dan Pelayanan Sesuai Standar		Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana, Fasilitas dan penunjang Layanan Kesehatan			
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN														
Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai			Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (BLUD)					Persentase Penyediaan Sarana, Prasarana, Fasilitas dan Penunjang Layanan Kesehatan			
90%			95%			95%					100%			
SUB KEGIATAN														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Pengembangan Rumah Sakit		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
INDIKATOR SUB KEGIATAN														
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
2 dokumen			6 laporan		230 orang/bulan		1 unit kerja				1 unit		41 Unit	2 Paket

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Prof dr Soekandar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
c. Peningkatan Pelayanan BLUD
Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Pengembangan Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

MATRIK RKPD 2025

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RKPD 2025		SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Target	Rp		
KODE SKPD							SOEKANDAR
NAMA SKPD		RSUD PROF DR. SOEKANDAR					SOEKANDAR
		228.727.668.000					
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	87 (A); 4 Inovasi	177.000.000.000		SOEKANDAR
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	90,00%	-		SOEKANDAR
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen			SOEKANDAR
		Rincian :					SOEKANDAR
		Penyusunan RENSTRA, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rankir Renja, Renja, Rancangan P-Renja, P-Renja				APBD	SOEKANDAR
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan			SOEKANDAR
		Rincian :					SOEKANDAR

		Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulan, LKjIP, SAKIP				APBD	SOEKANDAR
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,00%	17.000.000.000		SOEKANDAR
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235 orang/bulan	17.000.000.000		SOEKANDAR
		Rincian :					SOEKANDAR
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.000.000.000	APBD	SOEKANDAR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran BLUD; Indeks Profesionalitas ASN	95%; 87	160.000.000.000		SOEKANDAR
		Rincian :					
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Presentase Realisasi Anggaran BLUD	95,00%	160.000.000.000	BLUD	SOEKANDAR
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi; Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Paripurna; 95.00%	51.727.668.000		SOEKANDAR
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23 Unit	27.345.400.000		SOEKANDAR
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	27.345.400.000		SOEKANDAR
		Rincian :					
		Pengadaan Gedung Parkir		1 Unit	27.345.400.000	APBD	SOEKANDAR

	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	24.382.268.000		SOEKANDAR
		Rincian :					
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kedokteran - DAK Fisik		10 unit	10.000.000.000	DAK F	SOEKANDAR
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kedokteran - DBHCHT		2 Unit	2.000.000.000	DBHCHT	SOEKANDAR
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Kedokteran - APBD		10 unit	12.382.268.000	DAU (Earmark)	SOEKANDAR
JUMLAH TOTAL					228.727.668.000		SOEKANDAR

Tabel T-C.33

(Tabel T-C.33 dalam Lampitan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Nama Perangkat
Daerah :
RSUD Prof. dr.
Soekandar

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 . 02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				261.497.268.000				261.497.268.000
1 . 02 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang terinterialisai dan tersosialisasi	RSUD Prof. dr.Soekandar	86,0 4 Inovasi	167.015.000.000	APBD, BLUD		86,5 5 Inovasi	167.015.000.000
1 . 02 . 01. 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		95 %		APBD		95 %	15.000.000
1 . 02 . 01. 2.01. 01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen		APBD		2 Dokumen	7.500.000
1 . 02 . 01. 2.01. 07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan		APBD		6 Laporan	7.500.000

1 . 02 . 01 . 2 . 02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		95 %	17.000.000.000	APBD		95 %	17.000.000.000
1 . 02 . 01 . 2 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		235 orang/ bulan	17.000.000.000	APBD		240 orang/ bulan	17.000.000.000
1 . 02 . 01 . 2 . 10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase realisasi anggaran (BLUD); Indeks Profesionalitas ASN		95 % ; 87				95 % ; 87,5	
1 . 02 . 01 . 2 . 10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 unit kerja	160.000.000.000	BLUD		1 unit kerja	150.000.000.000
1 . 02 . 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi; Presentase Indikator SPM yang mencapai target		Paripurna ; 95 %	94.482.268.000	APBD DBHCHT DAK DAU (Earmark)		Paripurna ; 95 %	94.482.268.000
1 . 02 . 02 . 2 . 01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Gedung/ Bangunan yang Dikembangkan ; Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;		1 Unit Gedung Parkir ; 22 unit	94.482.268.000	APBD DBHCHT DAK DAU (Earmark)		1 Unit Gedung H; 22 unit	94.482.268.000

1.02.02 .2.01. 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan, sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk minimal 1 : 1000		1 unit gedung parkir	70.000.000.000	-			70.000.000.000
1.02.02 .2.01. 05.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		22 Unit/ Set	24.482.268.000	APBD DBHCHT DAK DAU (Earmark)		20 Unit/ Set	24.482.268.000
		Pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran		10 Unit	10.000.000.000	DAK Fisik			10.000.000.000
		Pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran		2 Unit	2.000.000.000	DBHCHT			2.000.000.000
		Pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran		10 Unit	12.382.268.000	DAU (Earmark)			12.382.268.000
TOTAL					228.727.668.000				228.727.668.000

BAB 5

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Pentingnya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit dengan penilaian akreditasi yaitu penilaian oleh lembaga independen khusus penilai mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit serta penilaian oleh publik (pengguna layanan fasilitas kesehatan) melalui survey kepuasan masyarakat.

Pentingnya penunjang pelayanan rumah sakit dengan pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana rumah sakit yaitu pemenuhan bangunan yang representatif, alat kesehatan yang berfungsi baik, prasarana lain penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pentingnya SDM yang berkualitas dan tata kelola administrasi rumah sakit yang baik juga menunjang peningkatan mutu dan kualitas pelayanan di rumah sakit.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 memuat visi, misi, arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Dokumen rancangan Akhir rencana kerja 2025 ini juga sebagai dokumen penegasan dokumen RKPD dijadikan acuan penyusunan kebijakan publik dan anggaran pemerintah Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Akhir rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, rancangan rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai

suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya rancangan Akhir rencana kerja RSUD Prof. dr. Soekandar ini diharapkan pada tahun 2025 akan ada landasan dan arah yang jelas bagi RSUD Prof. dr. Soekandar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah dan memberikan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Juni 2024

Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto



dr. DJALU NASKUTUB, M.M.R

Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 200112 1 001